



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

(BIDANG: PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke-	:	12
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Badan Pusat Statistik RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 28 Januari 2026
Waktu	:	Pukul 10:00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gd Nusantara I DPR RI
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Kinerja TA 2025.2. Rencana Kerja Strategis TA 2026.3. Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2026.4. Persiapan Sensus Ekonomi 2026;5. Lain - lain.
Ketua Rapat	:	MY Esti Wijayati, S.H./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	:	<p>A. Amalia Adininggar Widyasanti (Kepala Badan Pusat Statistik);</p> <p>B. 26 (dua puluh enam) Anggota dari 45 (empat puluh lima) Anggota Komisi X DPR RI dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi.</p>

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.31 WIB oleh MY Esti Wijayati, S.H./Wakil Ketua Komisi X DPR RI setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh ketua rapat, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Badan Pusat Statistik serta tanggapan/tanya jawab anggota Komisi X DPR RI, dan diakhiri dengan pembacaan kesimpulan.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran BPS RI pada APBN TA 2025 sebesar 96,30 % atau sebesar **Rp5.107.790.119.492** (*Lima triliun seratus tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*) dari pagu sebesar **Rp5.304.241.820.000** (*Lima triliun tiga ratus empat miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*). Selanjutnya Komisi X DPR RI mengharapkan capaian realisasi tersebut dapat ditingkatkan pada TA 2026.
2. Komisi X DPR RI mendesak BPS RI agar rencana kerja dan program-program TA 2026 dilaksanakan secara terukur dan tetap merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan beberapa penekanan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan BPS RI untuk mendukung tema besar pembangunan nasional 2026 (SE2026, Susenas, Sakernas, Pendataan Statistik Pertanian, Seruti, Survei Tanaman Pangan, Survei Bidang Jasa Pariwisata, dan 131 aktivitas lainnya) dapat direalisasikan dengan optimal.
 - b. BPS RI menginisiasi dan mengoptimalkan dukungan data statistik terkait kebudayaan, pendidikan, dan kepemudaan.
 - c. BPS RI akan menjajaki potensi pengembangan statistik baru lainnya, seperti keolahragaan dan lingkungan hidup.
 - d. BPS RI merumuskan strategi untuk mengoptimalkan alokasi anggaran pada APBN TA 2026 agar program dan kegiatannya dapat terealisasi sesuai target.
 - e. Data statistik harus menjadi dasar pertimbangan kebijakan pusat, daerah dan kebijakan publik lainnya.
3. Komisi X DPR RI dan BPS RI sepakat untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan beberapa penekanan dan catatan kepada BPS RI sebagai berikut:
 - a. Memastikan kesiapan seluruh SDM dan infrastruktur pendukung sensus, utamanya infrastruktur teknologi, sistem pengolahan datanya, petugas lapangan dan proses rekrutmennya serta meminimalisir tugas ganda dari petugas lapangannya.
 - b. Secara konsisten dan terukur melakukan program-program peningkatan kompetensi petugas lapangan, khususnya dalam hal kompetensi komunikasi dengan seluruh pelaku usaha dan masyarakat.
 - c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan K/L lain, dan mengoptimalkan pelibatan unsur masyarakat serta media sosial dalam persiapan dan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
 - d. Dalam membangun argumentasi urgensi Sensus Ekonomi 2026 agar memasukkan pertimbangan situasi dan kondisi domestik terkini termasuk faktor kebencanaan.
 - e. Memastikan data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026, berkualitas, independen, objektif, akurat, terstandar internasional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara metodologi maupun hasilnya.
 - f. Untuk meningkatkan kepercayaan publik BPS RI harus melakukan upaya transparansi metodologi, keterbukaan informasi publik, konsistensi data, akuntabilitas penyajian data dan pelayanan statistik terpadu.

- g. Hasil data statistik agar dapat mudah di akses dan disajikan secara sederhana sehingga dapat dibaca oleh berbagai kalangan masyarakat.
- 4. Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dan Keppres Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, Komisi X DPR RI mendesak BPS RI agar secara konsisten melaksanakan tugasnya.
- 5. BPS RI segera menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan atau tanggapan dari anggota Komisi X DPR RI dan data bencana Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025, paling lambat 5 Februari 2026.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.16 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik

ttd.

Amalia Adininggar Widyasanti

Ketua Rapat,

ttd.

MY Esti Wijayati, S.H